

**IMPLEMENTASI PROGRAM ASURANSI USAHA TANI PADI
PROVINSI LAMPUNG**

Skripsi

Oleh:

M. Bagus Prayuda



**ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

The implementation of Program Rice Farming Insurance in Province Lampung.

By

M. BagusPrayuda

Rice Farming Insurance Program aims to help self-sufficient food in the field of rice farmers. In addition this programs is also intended to protect the rice farmers due to climate change erratic. However there are other accent that appears in the implementation of the communication rice farming insurance program have not expressed both in LampungProvince , so that farmers are not fully aware of the program .Besides that, resources has not compliedthe capacity to support the sustainability ofRiceFarmingInsuranceProgram, so information about insurance program has expressed thorough.

The purpose of this research to produce the causethe problems of ricefarming insurance programin Province Lampung. Type of this research is descriptive with a qualitative approach. Data on this research it consistsof primary and secondary data, collected or obtained through by documentation and interview to a source of information (informants) in the field wich is having competence to the issue of research. Then this data in managed and analysed in descriptive qualitative through by measures reduction data, presentation of data and the with drawal of conclusion. Based on this analysis can be concluded that Rice Farming Insurance Progrem of Province Lampung now has not running good enough. On the basis of conclusion in upon an author suggested that human resources like quantity, quality and training at the agent marketing PT insurance service Indonesia (PERSERO) Branches Lampung.

Keywords : Public Policy, Implementation

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM AOTP (Asuransi Usaha Tani Padi) PROVINSI LAMPUNG

Oleh

M. Bagus Prayuda

Program Asuransi Usaha Tani Padi bertujuan untuk mensukseskan SWASEMBADA PANGAN di bidang petani padi. Selain itu program ini juga bertujuan untuk melindungi para petani padi akibat perubahan iklim yang tidak menentu. Kendati demikian ada aksesoris lain yang muncul yaitu komunikasi dalam implementasi program asuransi usaha tani padi Provinsi Lampung belum tersalurkan dengan baik, sehingga para petani belum sepenuhnya mengetahui program ini. Selain itu sumberdaya belum memenuhi kapasitas untuk menunjang keberlangsungan program Asuransi Usaha Tani Padi, sehingga informasi tentang adanya program Asuransi ini belum tersalurkan dengan menyeluruh.

Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan gambaran faktor yang menyebabkan permasalahan Program Asuransi Usaha Tani Padi di Provinsi Lampung. Tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, dikumpulkan atau diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara kepada sumber informasi (Informan) di lapangan yang memiliki kompetensi dengan masalah penelitian. Data kemudian dikelola dan dianalisa secara deskriptif kualitatif melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian terdapat temuan kuantitas tenaga marketing yang kurang sehingga analisis data maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program Asuransi Usaha Tani Padi Provinsi Lampung saat ini belum berjalan dengan baik. Atas dasar kesimpulan di atas penulis menyarankan agar sumber daya manusia seperti kuantitas, kualitas dan pelatihan pada agen marketing PT. Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) Cabang Lampung

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi

**IMPLEMENTASI PROGRAM ASURANSI USAHA TANI PADI
PROVINSI LAMPUNG**

Oleh:

M. Bagus Prayuda

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI BISNIS**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

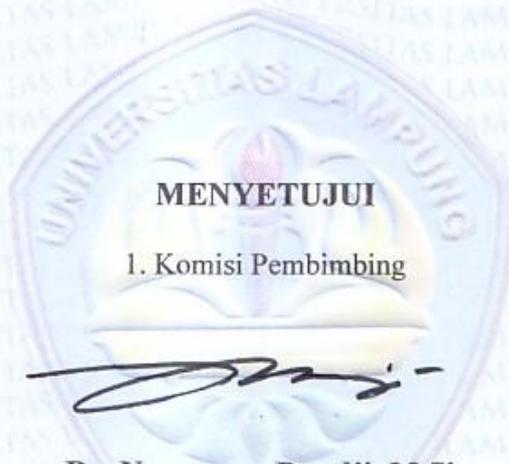
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **M. Bagus Prayuda**

No. Pokok Mahasiswa : 1216041060

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

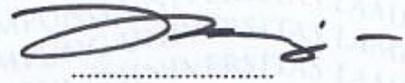
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

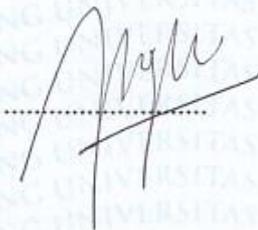
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Noverman Duadji, M.Si.**



Penguji Utama : **Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 November 2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/AhliMadya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 17 November 2017
Yang membuat pernyataan,



M BAGUS PRAYUDA
NPM. 1216041060

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Bagus Prayuda, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 25 Desember 1993. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yaitu Nova Andriani, Esty Kartika Rini. Penulis lahir dari pasangan Ibu Maisaroh, SE dan Bapak Suwandi. Pendidikan yang telah ditempuh Penulis yakni pendidikan Tingkat Pertama Tunas Mekar Indonesia dan lulus pada tahun 2000, Sekolah Dasar AL-Kautsar dan lulus pada tahun 2006, setelah lulus dilanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama AL-Kautsar dan lulus pada tahun 2009, kemudian dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Yayasan Pembina Unila Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung. Pada tahun 2015 di akhir bulan juli, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Margalestari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Selama jadi mahasiswa Penulis ikut aktif di Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA).

MOTTO

- ❖ Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat
(Winston Churchill)
- ❖ Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat, orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun islam dan pahala yang yang diberikan kepadanya sama dengan para Nabi
(HR. Dailani dari Anas R.A)
- ❖ Barang siapa menginginkan kebahagiaan didunia haruslah dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan pada keduanya maka haruslah dengan ilmu
(HR. Ibnu Asakir)
- ❖ Belajarlah seperti ilmu padi yaitu semakin merunduk semakin pula berisi artinya semakin kita banyak belajar maka semakin banyak juga ilmu yang didapat
(M. Bagus Prayuda)

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT
Ku persembahkan karya sederhanaku ini untuk:*

*Bapak dan Ibu serta kakak-kakaku tercinta
yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
Terima kasih atas cinta, kasih sayang, kesabaran,
keikhlasan, dan doa dalam menanti keberhasilanku.*

*Keluarga besarku, sahabat, serta teman – temanku yang
selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepadaku.*

Para pendidik dan Almamater Universitas Lampung.

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin tercurah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa juga shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sang motivator bagi penulis untuk selalu ikhlas dan bertanggung jawab dalam melakukan segala hal. Atas segala kehendak dan kuasa Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Implementas AOTP (Program Asuransi Usaha Tani Padi) Provinsi Lampung**", sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (SAP) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Teruntuk kedua orangtuaku yang telah merawat dan membesarkanku ibuku tersayang Maisaroh, SE dan bapakku tersayang Suwandi, serta kakak-kakakku yang kusayangi Nova Andriani, SE dan Esty Kartika Rini, SE yang selalu memberikan dukungan dan do'a hingga kini.
2. Bapak Dr. Noverman Duadji M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah begitu banyak memberikan masukan, ilmu, arahan, waktu dan motivasi nya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik
3. Dr. Novita Tresiana M.Si selaku Dosen Pembahas yang telah begitu banyak memberikan kritik, saran serta masukan dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
4. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih untuk motivasi dan ilmu bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis sehingga memotivasi penulis untuk menjadi lebih baik dalam mencapai kesuksesan.
6. Bapak Nana Mulyana, S.IP, M.Si selaku pembimbing akademik. Terima kasih untuk Bapak Nana yang sudah memberikan ilmu, saran, waktu, nasehat, dan bimbingannya dengan sabar sehingga apa yang diberikan dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis menjadi giat untuk lebih cepat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Nur dan Bapak Azhari selaku staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah berjasa memberikan arahan dan motivasi khususnya dalam bidang administrasi sejak perkuliahan, seminar, surat riset, hingga ujian komprehensif.

8. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP UNILA, terima kasih atas semua ilmu yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan. Semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis kedepannya.
9. Kepada Bapak Budi Yunarto selaku Kepala seksi Permodalan, Pengelolaan, Pemasaran Hasil Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung yang ramah dan juga bersedia membantu peneliti untuk mengumpulkan data.
10. Kepada Bapak Titus Laksa Gumilang selaku Marketing Asuransi Usaha Tani Padi PT. Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) yang telah membantu peneliti dalam pengumpulan data.
11. Kepada Bapak Mariman selaku Kepala Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan yang telah memberikan izin untuk melakukan riset di desanya yang sangat tentram.
12. Kepada Masyarakat Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan Terimakasih sudah menerima penulis untuk melakukan riset di desanya.
13. Guru-guruku tercinta mulai dari pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama hingga Sekolah Menengah Atas, yang tidak disebutkan satu persatu.
14. Saudara-saudaraku tercinta yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak sudah membantu.
15. Sahabat terbaikku Putu Indra Jaya, SAN yang sudah memotivasi, membimbing, dan sabar untuk menghadapiku yang kadang pemalas ini, semoga kelak persahabatan kita akan selalu terjaga sampai kapanpun, dan semoga cita-cita kita untuk menjadi orang yang sukses akan terwujud.

16. Sahabatku M. Nur Ihsan dan Ahmad Hamdani yang selalu menemaniku kemanapun, yang selalu memberi arahan dan semangat, semoga persahabatan kita akan selalu terjaga sampai kapanpun..
17. Keluarga Besar Ampera, terima kasih untuk semua cerita yang telah kalian lukiskan selama ini. Aku merasa bahagia kenal kalian karena kehadiran serta canda tawa kalian semua. Terima kasih juga buat kebersamaan terindah yang telah kita lalui bersama dari awal perkuliahan sampai saat ini takkan pernah terlupakan, semoga kita semua menjadi orang sukses.
18. Sahabat-sahabat KKN Kabupaten Lampung Selatan desa Marga Lestari Jati Agung. Terima kasih buat pengalaman 60 hari yang indah, berkesan, dan yang tak terlupakan sampai kapanpun.
19. Bapak Wito dan Ibu Wiji sebagai induk semang saat KKN, terimakasih sudah memberikan pelajaran berharga untuk berternak dan berkebun terimakasih sudah menyediakan tempat tinggal dan menjadi orangtua angkatku.
20. Seluruh keluarga besar HIMAGARA. Terima kasih sudah memberikan dukungan dan bantuannya selama ini.
21. Para pembahas mahasiswa/i dan moderatorku dari proposal dan hasil terima kasih telah meluangkan waktunya, sudah memberikan kritikan dan sarannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
22. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku dan teman-temanku semua yang telah memberikan dukungan dan doa selama dalam menyelesaikan skripsi ini.
23. Keluarga besar Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama belajar di Universitas Lampung

24. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuannya.
25. Teruntuk Firda Fitria Nasution, S.E sahabat merangkap pacar, terimakasih untuk pemberian support dan nasihat nya, terimakasih untuk selalu sabar, terima kasih untuk selalu ada dalam keadaan apapun baik suka maupun duka, terimakasih sudah selalu mendengarkan segala curhatan, semoga semua apa yang kita cita-cita kan dapat terwujud dengan baik dan diberkahi oleh Allah SWT, amiinn.

Tidak ada kata yang lebih indah selain kata “terima kasih dan maaf” atas semua nya. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi saya berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua aamiin.

Bandar Lampung, 17 November 2017
Penulis,

M. Bagus Prayuda
1216041060

DAFTAR ISI

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik.....	5
B. Implementasi Kebijakan.....	8
C. Model-Model Implementasi Kebijakan.....	9
D. Kajian dasar tentang Program AOTP.....	16
E. Kerangka Pikir.....	17

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Metode Penelitian	20
B. Fokus Penelitian	21
C. Lokasi Penelitian	21
D. Jenis dan Sumber Data.....	22
E. Teknik Pengumpulan Data	24
F. Teknik Analisis Data	25
G. Teknik Keabsahan Data	25

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung...	27
B. Gambaran Umum PT. Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) Cabang Bandar Lampung	32

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Komunikasi 38
B. Sumber Daya 45
C. Disposisi 53
D. Struktur Birokrasi..... 56

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 65
B. Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	19
2. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung .	31
3. Struktur Organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) Cabang Lampung .	35
4. Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	39
5. Brosur Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	40
6. Struktur Penjualan PT. Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) Cabang Lampung...	46
7. Mekanisme pelaksanaan AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi).....	57
8. Penyerahan klaim gagal panen Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).....	59
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung/ Ketua Tim Pembina UPSUS P2JK Provinsi Lampung.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel Sasaran AUTP 2015 per Kabupaten/Kota	2
2. Realisasi AUTP 2015 per Kabupaten/Kota	3
3. Daftar Informan	23
4. Daftar dokumen-dokumen yang akan digunakan	24
5. Data Calon Peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	47
6. Tabel Pembiayaan/Pendanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	51

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Petani mengalami kesulitan karena gagal panen yang disebabkan iklim yang sulit untuk diprediksi oleh petani. Atas dasar itu maka pemerintah wajib melakukan pembinaan, perlindungan dan bantuan kepada siapapun termasuk petani yang mengalami kesulitan. Program ini adalah bentuk intervensi pemerintah yang diwujudkan dalam kebijakan publik. Dalam konteks ini kebijakan tersebut adalah Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Program ini dibentuk oleh Kementerian Pertanian atas dasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindak lanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Mekanisme pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Provinsi Lampung melibatkan berbagai pihak atau instansi seperti Dinas Pertanian Provinsi dan PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Cabang Bandar Lampung, dilibatkannya PT. Jasindo dipercaya sebagai pihak penanggung untuk mengcover klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung yaitu kelompok tani.

Program ini sudah berlangsung hampir 2 tahun di seluruh Provinsi Lampung yang terdiri dari 15 kabupaten/kota. Namun sejak diterapkannya program AUTP belum bisa menyelesaikan masalah kesulitan yang dialami para petani. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Yunarto, Rabu (20/7/2016) mengatakan bahwa pada bulan Oktober 2015, Badan Permodalan, Pengelolaan, dan Pemasaran Hasil (P3H) Jakarta dibubarkan. Hal ini mempengaruhi hierarki dibawahnya. Selain itu terdapat juga masalah dimana PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Bandar Lampung Merugi karena banyaknya peserta yang klaim dibandingkan dengan yang mendaftar. Hal ini dikatakan oleh Ibu Sugiarti selaku Kepala Seksi Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Selain itu penerapan terjadi pada sosialisasi yang tidak menyeluruh dimana hanya 5 kabupaten yang jadi sasaran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Hal ini dapat dilihat dari tabel sasaran dibawah ini dimana target sasaran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) per Kabupaten/Kota yaitu 54.000 Ha namun yang terealisasinya hanya 6.033,606 Ha.

Tabel 1.1. Sasaran AUTP 2015 per Kabupaten/Kota

No.	Kab/Kota	Luas Lahan Sawah		Sasaran AUTP 2015 (Ha)
		(Ha)	%	
1	Tanggamus	20,643	9,26	5.000
2	Lampung Timur	59,957	29,63	16.000
3	Lampung Tengah	76,724	35,18	19.000
4	Lampung Utara	18,761	16,67	9.000
5	Pringsewu	13,528	9,26	5.000
6	Lampung Barat	13,126	0,00	0
7	Lampung Selatan	45,575	0,00	0
8	Tulang Bawang	38,177	0,00	0
9	Pesawaran	13,140	0,00	0
10	Pesisir Barat	7,952	0,00	0
11	Bandar Lampung	984	0,00	0
12	Way kanan	18,767	0,00	0
13	Mesuji	26,844	0,00	0
14	Tulang Bawang Barat	12,209	0,00	0
15	Metro	2,975	0,00	0
Jumlah		369,362	100.00	54.000

Sumber : Laporan pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 2015

Tabel 1.2 Realisasi AUTP 2015 per Kabupaten/Kota

No.	Kab/Kota	Luas Lahan Sawah		Realisasi AUTP 2015 (Ha)
		(Ha)	%	
1	Tanggamus	20,643	0,28	150,000
2	Lampung Timur	59,957	0,70	376,640
3	Lampung Tengah	76,724	1,34	723,465
4	Lampung Utara	18,761	1,55	835,500
5	Pringsewu	13,528	1,40	758,501
6	Lampung Selatan	45,575	0,55	297,500
7	Tulang Bawang	38,177	2,72	1.470,250
8	Pesawaran	13,140	0,13	69,000
9	Way Kanan	18,767	0,93	500,000
10	Mesuji	26,844	1,58	852,750
11	Lampung Barat	13,126	0,00	0
12	Pesisir Barat	7,952	0,00	0
13	Bandar Lampung	984	0,00	0
14	Tulang Bawang Barat	12,209	0,00	0
15	Metro	2,975	0,00	0
Jumlah		369,362	11,17	6.033,606

Sumber : Laporan pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 2015

Pada tahun 2015 terdapat 10 kabupaten percobaan realisasi AUTP yang terdiri dari Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Pringsewu, Lampung Selatan, Tulang Bawang, Pesawaran, Waykanan dan Mesuji. sementara kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat dan kota Bandar Lampung serta Metro belum terealisasi AUTP. Sehingga kompilasi dari masalah ini layak dikaji menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Edward III.

Menurut Edward III dalam Agustino (2012:150) “terdapat empat variabel yang saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan”. Adapun model Edward III terdiri 4 variabel yaitu (a). Komunikasi; (b). Sumberdaya; (c). Disposisi; (d). Struktur Birokasi.

Dari penjabaran fenomena sesuai kajian diatas mengenai masalah permodalan akibat dibubarkan Permodalan, Pengelolaan dan Pemasaran Hasil (P3H) Jakarta dan belum maksimalnya realisasi program AOTP Provinsi Lampung masuk dalam kajian implementasi. Sesuai dengan gambaran tersebut peneliti tertarik untuk meneliti

“Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi Provinsi Lampung”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menghasilkan gambaran Implementasi Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi Provinsi Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Memberikan kajian kinerja Implementasi kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi ;

Manfaat Praktis

Memberikan masukan dan kontribusi pemikiran mengenai metode dalam pelaksanaan kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Definisi Kebijakan Publik

Menurut Dye dalam Agustino (2012:7) “Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Melalui definisi ini kita mendapat pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara apa yang akan dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah”.

Menurut Islamy dalam Sulistio (tanpa tahun:3) “Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat”.

Menurut Udoji dalam Wahab (2014:15) “Kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat”.

Berdasarkan berbagai pengertian kebijakan publik di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

a) Tahap 1 : Penyusunan Agenda

Menurut Sulistio (tanpa tahun:13) “Agenda Kebijakan merupakan langkah selanjutnya dari isu kebijakan dapat diangkat menjadi agenda kebijakan jika mendapat respon secara positif, negatif, positif dalam waktu lama, dan mendapat respon setengah hati”. Menurut Wahab (2008:34) “Penyusunan Agenda adalah daftar persoalan yang menjadi perhatian serius oleh pejabat pemerintah. Proses penyusunan agenda pada dasarnya merupakan persoalan politik dan karena itu kental dalam muatan politik”.

b) Tahap 2 : Perumusan Kebijakan

Menurut Islamy dalam Agustino (2012:119) “Perumusan kebijakan yang baik akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan para analis kebijakan dalam merumuskan masalah kebijakan”. Menurut Wahab (2008:35) “Perumusan Kebijakan adalah proses pengesahan yang dirancang secara khusus untuk mengatasi atau mengurangi masalah yang terjadi di masa lalu atau untuk mencegah terjadinya kembali masalah kebijakan publik yang kurang yang lebih sama di masa yang akan datang”.

c) Tahap 3 : Implementasi Kebijakan

Menurut Mazmania dan Sabatier dalam Agustino (2012:139) mendefinisikan, “Implementasi kebijakan sebagai pelaksana keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut

mengidentifikasi masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Menurut Wahab (2008:35) “Implementasi Kebijakan merupakan suatu proses output atau suatu hasil akhir (*outcome*). Dilihat sebagai proses, implementasi akan mengacu pada serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk sesegera mungkin menghasilkan dampak tertentu yang dikehendaki. Konsep output atau pengeluaran implementasi mengacu kepada cara-cara atau sarana yang telah dipakai untuk mencapai tujuan tertentu yang telah diprogramkan”.

d) Tahap 4 : Evaluasi Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2012:185) “Evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan”. Menurut Wahab (2008:37) “Evaluasi Kebijakan pada hakikatnya mempersoalkan apa yang sesungguhnya telah terjadi sebagai hasil dari sebuah kebijakan atau apa yang terjadi sesudah kebijakan tersebut diimplementasikan”.

e) Tahap 5 : Perubahan Kebijakan

Menurut Wahab (2008:38), “Perubahan Kebijakan merupakan konsep yang dikembangkan dan dimasukkan dalam siklus kebijakan. Konsep ini sebagian besar berasal dari hasil karya Paul Sabatier dan kawan-kawan di

mana mencakup berbagai tahapan dari siklus kebijakan seperti perumusan kebijakan implementasi, evaluasi dan terminasi”.

f) Tahap 6 : Terminasi Kebijakan

Menurut Parsons (2005:574), “Terminasi Kebijakan merupakan sisi lain dari inovasi. Dalam terminasi, sebuah kebijakan atau program akan dihentikan. Menurut Wahab (2008:38), “Terminasi Kebijakan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan cara mengakhiri kebijakan-kebijakan yang telah kadaluarsa atau kinerjanya dianggap tidak lagi memadai”.

B. Implementasi Kebijakan

Menurut Grinddle dalam Sulistio (tanpatahun:38) “Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2012:139) mendefinisikan, “Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Menurut Anderson dalam Parsons (2005:464) “Implementasi adalah pelaksanaan pembuatan kebijakan dengan cara-cara lain”.

Jadi penulis membuat kesimpulan bahwa Implementasi adalah pelaksanaan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan tertentu yang telah digariskan.

C. Model – model dalam implementasi kebijakan

1. Model *Top-Down Approach* (Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn)

Menurut Sulistio (tanpa tahun:44) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna dibutuhkan syarat-syarat:

- a) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana akan menimbulkan kendala atau gangguan yang serius, jika berada di luar kendali implementor;
- b) Tersedianya waktu dan sumber daya yang memadai;
- c) Perpaduan sumber daya yang dibutuhkan benar-benar ada;
- d) Kebijakan itu dipengaruhi oleh adanya hubungan kausalitas yang handal;
- e) Hubungan kausalitas itu harus bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
- f) Hubungan ketergantungan harus kecil;
- g) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
- h) Tugas-tugas diperinci dan di tempatkan dalam urutan yang tepat;
- i) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna, dan;

- j) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan;

2. Model *Top Down*/ Model Implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Menurut Agustino (2012:141) model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Adapun model tersebut terdiri dari enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka sedikit sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit diharapkan.

Selain sumberdaya manusia, perlu dipertimbangkan sumberdaya lainnya seperti: sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakterhasilan implementasi kebijakan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku

atau tindaklaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

3. Model Top Down/Model Implementasi Merilee S. Grindle

Menurut Grindle dalam Agustino (2012:154), keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari atas Content of Policy dan Context of Policy.

4. Model Implementasi George C. Edward III

Menurut Edward dalam Agustino (2012:149) terdapat empat variabel sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan:

a. Komunikasi

Menurut Edward dalam Agustino (2012:50), komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Terdapat tiga

indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

1. *Transmisi*, penyaluran komunikasi dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik sehingga komunikasi yang baik harus tersalurkan ke seluruh implementor.
2. *Kejelasan*, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).
3. *Konsistensi*, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b. Sumber Daya

Sumberdaya merupakan hal penting lainnya, menurut Edward III dalam Agustino (2012:151), dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1. *Staf*, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.
2. *Informasi*, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *kedua* informasi mengenai data kepatuhan dari para

pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

3. *Wewenang*, kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

4. *Fasilitas*, implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi.

Menurut Edward III dalam Agustino (2012:152) variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, adalah disposisi. Adapun dimensi-dimensi dari disposisi yaitu:

1. *Pengangkatan birokrat*, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

2. *Insentif*, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

d. Struktur Birokrasi.

Variabel *keempat*, menurut Edward III dalam Agustino (2012:153), yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi Terdapat dua karakteristik menurut Edward III dalam Agustino (2012:153), yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah: melakukan *Standar Operating Procedures (SOPs)* dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau para pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja.

D. Kajian dasar tentang Program AUTP

Menurut Laporan Pelaksanaan Kegiatan AUTP 2015, perlindungan usaha tani dalam bentuk asuransi pertanian tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaa petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. Selain itu menurut lampiran keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 02/Kpts/SR.220/B/01/2016 latar belakang dibentuknya program AUTP ini berkaitan dengan pencapaian target swasembada pangan. Pada pelaksanaan untuk pencapaian swasembada pangan

terdapat masalah yaitu risiko ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif perubahan iklim yang merugikan petani. Untuk mengatasi kerugian petani maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usaha tani dalam bentuk asuransi pertanian.

Maksud penyelenggaraan AUTP ini adalah untuk melindungi kerugian nilai ekonomi usaha tani padi akibat gagal panen, sehingga petani memiliki modal kerja untuk pertanaman berikutnya.

E. Kerangka Pikir

Program AUTP dibentuk untuk mengatasi kerugian petani akibat risiko ketidakpastian sebagai dampak perubahan iklim dimana maksud dan tujuan adalah untuk melindungi para petani

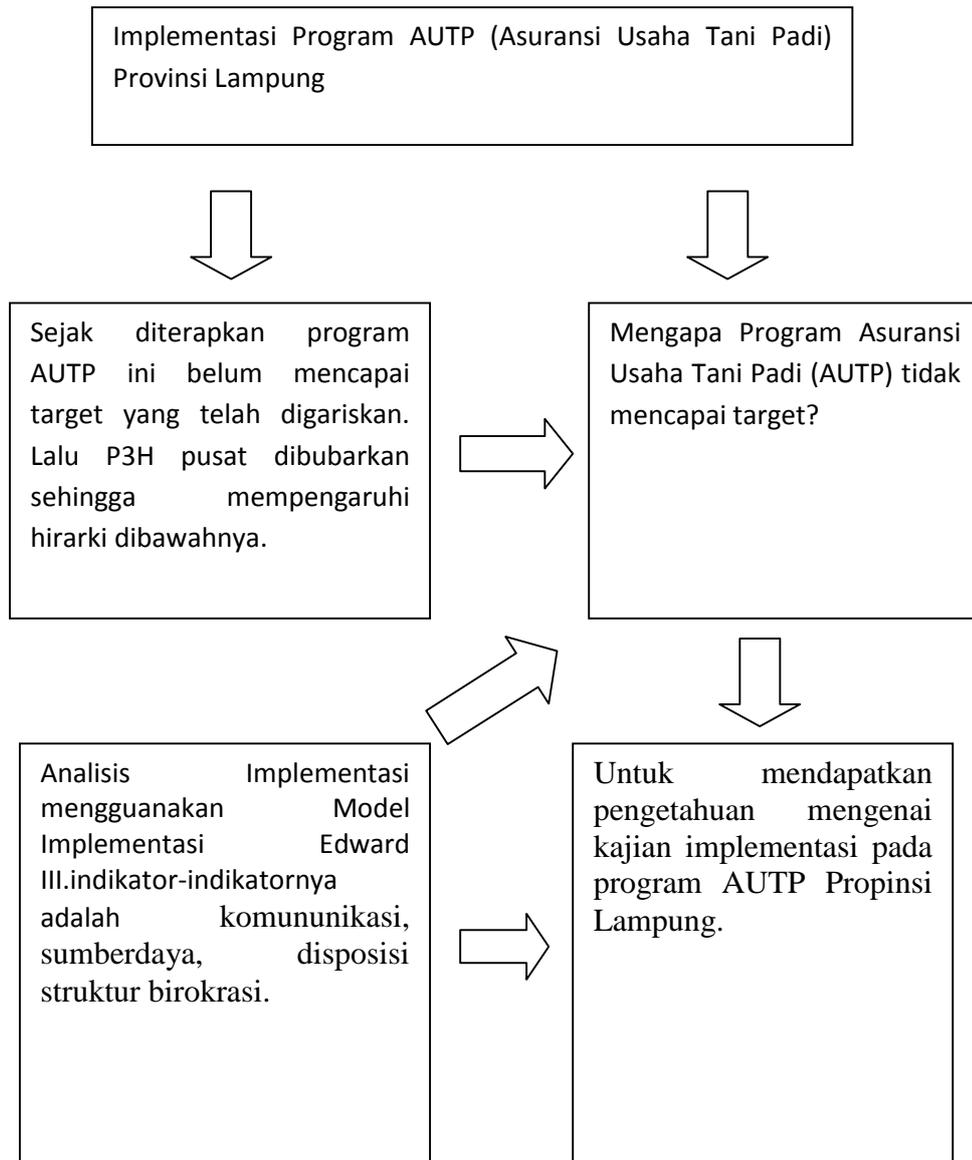
Namun sejak program ini di terapkan timbul masalah yang mengganggu pelaksanaan program AUTP adapun masalah dan fenomenanya yaitu P3H (Permodalan, Pengelolaan, Pemasaran Hasil Pertanian) Pusat di bubarkan maka menimbulkan dampak dana kegiatan dipangkas dan mempengaruhi hirarki di bawahnya selain itu program AUTP tidak mencapai target.

Berdasarkan hal di atas peneliti meramu masalah riset yaitu mengapa program AUTP belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Untuk mengkaji masalah tersebut peneliti menggunakan teori Edward III . Alasan peneliti menggunakan teori tersebut karena masalah ini masuk dalam kajian implementasi.

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan pengetahuan mengenai kajian implementasi pada program AOTP Propinsi Lampung.

Untuk mempermudah pemaparan kerangka pikir penulis membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

(Sumber : diolah oleh peneliti 2016)

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Sementara pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berupaya menggambarkan fenomena implementasi kebijakan AOTP (Asuransi Usaha Tani Padi) Provinsi Lampung. Fenomenanya yaitu dibubarkan P3H pusat sehingga permodalan untuk operasional pelaksana kebijakan terhenti dan target sasaran yang digariskan tidak mencapai angka yang ditargetkan.

Menurut Tresiana (2013:33) “Metode kualitatif deskriptif merupakan jenis metode kualitatif yang paling banyak dipengaruhi oleh pandangan pandangan kuantitatif”.

Posisi teori dalam metode kualitatif berjenis deskriptif sangat memandu semua kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Edward III untuk penetapan masalah yaitu masalah implementasi. Adapun penetapan masalah dalam penelitian ini yakni masalah implementasi program AOTP (Asuransi Usaha Tani Padi).

B. Fokus Penelitian

Menurut Creswell Tresiana (2013:39) “Merupakan konsep utama yang dibahas dalam suatu penelitian ilmiah”. Topik atau fokus itu dapat saja muncul dari tujuan literature, dianjurkan oleh rekan, rekan atau dikembangkan melalui pengalaman nyata. Ada beberapa langkah-langkah yang peneliti telah tentukan topik atau fokus penelitian yang dapat peneliti kualitatif lakukan. Langkah-langkah itu peneliti awali dengan: (a). memusatkan topic atau fokus dengan menggambarannya secara ringkas (b). menyusun konsep judul (c). mempertimbang topik tersebut untuk diteliti. Fokus dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Edward III yaitu: (a). Komunikasi; (b). Sumberdaya; (c). Disposisi atau Sikap agen pelaksana; (d). Sturuktur birokrasi.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti menetapkan lokasi penelitian di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. Hal ini dilakukan dengan dasar peneliti dapat mengumpulkan data-data yang mendukung dan data yang dibutuhkan selama proses penelitian berlangsung. Penelitian ini juga dilakukan di PT. Asuransi Jasa Indonesia Lampung (PERSERO) Cabang Bandar Lampung. Lokasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/Kpts/SR.220/B/01/2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi yang disampaikan kepada Kepala Dinas yang melaksanakan urusan dibidang tanaman pangan Kabupaten/Kota. Dipilihnya PT. Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) Cabang Bandar Lampung dalam lokasi

penelitian menurut informan, karena perusahaan ini ditunjuk Pemerintah dalam mengurus klaim asuransi pertanian. Mengenai Kabupaten/Kota yang terdampak dalam kebijakan ini berjumlah 10 Kabupaten/Kota dari jumlah keseluruhan 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Tresiana (2013:87) “Penelitian kualitatif sangat mengandalkan informasi atau data kualitatif primer langsung dari para informan yang terlibat. Studi kepustakaan juga digunakan oleh peneliti sebagai teknik pelengkap untuk mendapatkan informasi kualitatif sekunder, contohnya peneliti menggunakan personal memo berupa catatan pribadi, dokumen pribadi, notulensi, gambar atau foto, rekaman atau video, peta, monografi, dokumen kelembagaan, laporan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan AOTP”. Dalam penelitian ini jenis dan sumber data terdiri dari dua yaitu :

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu berasal dari informan yang terlibat. Informan yang terlibat akan diwawancarai untuk mendapatkan data primer. Di mana data primer ini diperoleh dari peneliti selama proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi terhadap Implementasi Program AOTP (Asuransi Usaha Tani Padi) Provinsi Lampung.

Adapun tabel Informan dalam penelitian ini adalah agen pelaksanaan yaitu :

Tabel 2. Tabel Informan

No.	Nama	Keterangan
1	Ir. Budi Yunarto	Kepala Seksi Permodalan, Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	Titus Laksa Gumilang	Marketing PT. Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) Cabang Bandar Lampung
3	Ir. Jamhari	Penyelia Mitra Tani Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
4	Mujimin	Kepala Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
5	Mariman	Ketua Kelompok Tani Mekar Sari II Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
6	Ngatijan	Ketua Kelompok Tani Amri Makmur Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

Sumber : Diolah oleh peneliti,2016

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini umumnya berupa dokumen-dokumen tertulis terkait dibentuknya program Asuransi Usaha Tani Padi.

Tabel 3. Daftar dokumen-dokumen yang akan digunakan

No	Dokumen-Dokumen	Substansi
1.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015	Berisi tentang Fasilitas Asuransi Pertanian
2.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 2015	Berisi tentang laporan-laporan kegiatan AUTP
3.	Pedoman Umum	Berisi tentang pedoman bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2016

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti mengestimasi tiga aspek penting yang dikatakan Creswell dalam Tresiana (2013:87), yaitu : Pertama, menetapkan batas-batas penelitian tentang implementasi kebijakan AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) di Provinsi Lampung. Kedua, mengumpulkan informasi melalui pengamatan, wawancara, dokumen dan bahan-bahan visual. Dalam hal ini peneliti sudah melakukan pengumpulan informasi berupa data pra-riset di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dan PT. Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) Cabang Bandar Lampung. Ketiga, menetapkan aturan untuk mencatat informasi dalam hal ini peneliti mencatat berupa informasi yang berhubungan dengan AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) di Provinsi Lampung.

F. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2010: 244), “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Analisis dalam penelitian ini pertama kali dilakukan dan pemilihan data dari hasil pra-riset. Data itu berupa wawancara, memperoleh buku laporan pelaksanaan kegiatan AUTP 2015 dan buku pedoman AUTP 2016.

G. Teknik Keabsahan Data

Menurut Tresiana (2013:142), “Persoalan validitas merupakan persoalan utama dalam semua bentuk desain penelitian. Metode pembuktian (validitas dan realibilitas) diterapkan untuk mengatasi dan menghindari terjadinya bias, yakni: bias peneliti karena faktor subjektivitas nilai, bias *keyinforman*, bias berupa arogansi subyektif pandangan informan, bias metode dan data”.

Menurut Paton, Miles dan Huberman dalam Tresiana (2013:144) “Ada beberapa teknik pembuktian (pemeriksaan) data yang efektif dalam penelitian kualitatif namun dalam penelitian ini menggunakan tehnik pembuktian yaitu:

1. Pembuktian Melalui Ketekunan Pengamatan
2. Pembuktian Melalui Triangulasi
3. Pembuktian Melalui Kecukupan Referensial
4. Pembuktian Melalui Secara Rinci
5. Pembuktian Melalui *Auditing*

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

1. Sejarah Berdirinya dan Landasan Operasional Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, sebelum tanggal 1 Januari 1964 masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan UU No.5 tahun 1959. yang berbeda di Provinsi Lampung, segala urusan yang ada masih menjadi urusan rumah tangga Sumatera Selatan yang diserahkan ke Dati II (Daerah Tingkat Dua) Lampung. Sebagai bagian Dati I (Daerah Tingkat Satu) Sumatera Selatan menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan rakyat kabupaten Dati II Lampung.

Urusan Pemerintah pusat dalam masalah pertanian yang diserahkan kepada Dati I Sumatera Selatan daerah No. 41 tahun 1951, adalah :

1. Soal pertanian rakyat,
2. Pendidikan,
3. soal penyelidikan percobaan, persediaan benih, bibit dan Tanaman-tanaman serta alat-alat pertanian,
4. Pemberantasan dan pencegahan penyakit tanaman,
5. Proaganda dan demonstrasi pertanian,

6. Rapat-rapat dengan materi pertanian,
7. Penyerahan urusan-urusan lain dari pertanian pada Provinsi Lampung,
8. Menyerahkan urusan-urusan pada daerah otonomi,
9. Bentuk dan jabatan Provinsi Lampung,
10. Bangunan-bangunan, tanah-tanah, hutang piutang,
11. Pegawai,
12. Keuangan.

Terhitung sejak 1 Januari 1964 berdasarkan UU No. 14 Tahun 1964 maka dibentuk Dati I Lampung yang meliputi wilayah Daerah tingkat II, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Utara, dan Kota Madya Tanjung Karang- Teluk Betung. Berdasarkan peraturan daerah Lampung No. 17 Tahun 2000 tanggal 29 Desember 2000, Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Lampung kembali berubah menjadi “Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung”.

2. Visi dan Misi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

a. Visi

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung mempunyai visi sebagai berikut:

“Meningkatkan Produksi dan nilai tambah produk mendukung peningkatan pendapatan menuju masyarakat tani yang sejahtera.”

b. Misi

Berdasarkan visi yang telah dijelaskan , maka misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai berikut:

- i. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pertanian,
- ii. Meningkatkan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang unggul dan berkualitas, berbasis IPTEK dan sumber daya lokal serta berwawasan lingkungan,
- iii. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

3. Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris Dinas, membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Perencanaan

c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :

- 1) Seksi Budidaya Serealia
- 2) Seksi Budidaya Kacang-Kacangan, Umbi-Umbian dan Pembenihan
- 3) Seksi Pasca Panen, Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan

d. Bidang Hortikultura, membawahi :

- 1) Seksi Budidaya Buah-Buahan dan Biofarmaka
- 2) Seksi Budidaya Sayur-Sayuran dan tanaman Hias
- 3) Seksi Pasca Panen, Pembenihan dan Perlindungan Hortikultura

e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi ;

- 1) Seksi Perluasan dan Pengelolaan Lahan
- 2) Seksi Pengelolaan Air Irigasi
- 3) Seksi Alsinta, Pupuk dan Prestisida

f. Bidang Permodalan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil

- 1) Seksi Pengolahan Hasil
- 2) Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil
- 3) Seksi Permodalan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri dari jumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

B. Gambaran Umum PT. Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) Cabang Bandar Lampung

1. Profil PT. Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO)

Pembentukan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah bangsa dan tanah air Indonesia. Sejarah tersebut bermula pada tahun 1845 ketika dilaksanakannya nasionalisasi atas NV Assurantie Maatschappij de Nederlander, sebuah perusahaan Asuransi Umum milik kolonial Belanda, dan Bloom Vander, perusahaan Asuransi Umum Inggris yang berkedudukan di Jakarta.

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dinyatakan pada 17 Agustus 1945 oleh Proklamator RI, Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta, sekaligus meng-amanatkan pelaksanaan pemindahan kekuasaan dan kepemilikan Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Indonesia. Termasuk, melakukan nasionalisasi terhadap dua perusahaan tersebut dan mengubah nama keduanya menjadi PT Asuransi Bendasraya yang bergerak di bidang Asuransi Umum dalam Rupiah dan PT Umum Internasional Underwriters (UIU) yang bergerak pada bidang Asuransi Umum dalam valuta asing.

Kedua perusahaan hasil tindak lanjut nasionalisasi ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat dan memperkuat keamanan serta perekonomian negara. Adapun kebijakan nasionalisasi tersebut dilaksanakan berdasarkan payung hukum Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasca implementasi kebijakan nasionalisasi dan pribumi maka kemudian muncul sebuah inisiatif untuk mengoptimalkan fungsi dan peran dari kedua perusahaan nasional tersebut dalam menghadapi tantangan sekaligus mengisi era kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam perjalanan bersejarahnya, melalui Keputusan Menteri Keuangan No.764/MK/IV/12/1972 tertanggal 9 Desember 1972, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan merger antara PT Asuransi Bendasraya dan PT Umum Internasional Underwriters (UIU) menjadi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha Asuransi Umum. Pengesahan penggabungan tersebut selanjutnya dikukuhkan dengan Akta Notaris Mohamad Ali Nomor 1 tanggal 2 Juni 1973.

Sebagai salah satu BUMN yang memiliki kinerja usaha gemilang di Indonesia, seluruh saham PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Apalagi, perjalanan waktu telah membuktikan bahwa PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau yang dikenal dengan Asuransi Jasindo, memang memiliki pengalaman yang mumpuni, panjang dan matang di bidang Asuransi Umum bahkan sejak era kolonial. Pengalaman ini memberikan nilai kepeloporan tersendiri bagi keberadaan dan pertumbuhan kinerja Asuransi Jasindo hingga saat ini, sehingga berhasil dalam meraih kepercayaan publik baik yang ada di dalam maupun di luar negeri.

Dalam menyuguhkan layanan profesional dan terbaiknya, Asuransi Jasindo senantiasa memegang teguh nilai-nilai budaya perusahaan yang ditanamkan yaitu Asah, Asih dan Asuh. Selain itu, Asuransi Jasa Indonesia juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima demi memenuhi kepuasan Tertanggung. Asuransi Jasindo juga banyak mendapatkan dukungan reasuradur terkemuka dari seluruh belahan dunia, seperti Swiss Re dan Partner Re, dalam memberikan back-up reasuransi, terutama pertanggungan yang bersifat mega-risk.

Dalam menyelesaikan klaim-klaim besar, komitmen atas ketepatan dan kecepatan Asuransi Jasindo tak perlu diragukan lagi. Hal ini dibuktikan dengan penyelesaian klaim-klaim besar bahkan hingga bernilai triliunan rupiah. Sebut saja misalnya, klaim Apogee Kick Motor Satelit Palapa B2 sebesar US\$ 75 juta, BDC Failure Satelit Palapa C2 senilai US\$ 31,2 juta, Battery Charging Failure Satelit Palapa C2 sebesar US\$ 36,5 juta, dan Loss of DB Satelit Garuda milik Aces International hingga senilai US\$ 101,5 juta.

Pengalaman dan kemampuan Asuransi Jasindo yang mengundang decak kagum ini, telah pula diakui oleh badan pemeringkat internasional yaitu Standard and Poor's untuk kategori "Claim Paying Ability" pada tahun 1997 dengan peringkat BBB. Selanjutnya, di tahun 2009, Asuransi Jasindo kembali mendapatkan pengakuan sebagai satu-satunya perusahaan Asuransi Umum nasional yang memperoleh rating dari badan pemeringkat internasional AM Best yang berbasis di Hongkong dan Amerika Serikat, untuk kategori "Financial Strength Ability" (Stable Outlook) dengan peringkat B++ dan Issuer Credit Ability (Stable Outlook) dengan peringkat BBB.

2. Visi dan Misi PT. Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) Cabang Bandar Lampung

a. Visi

Menjadi Perusahaan Asuransi Terpercaya dan Terandal.

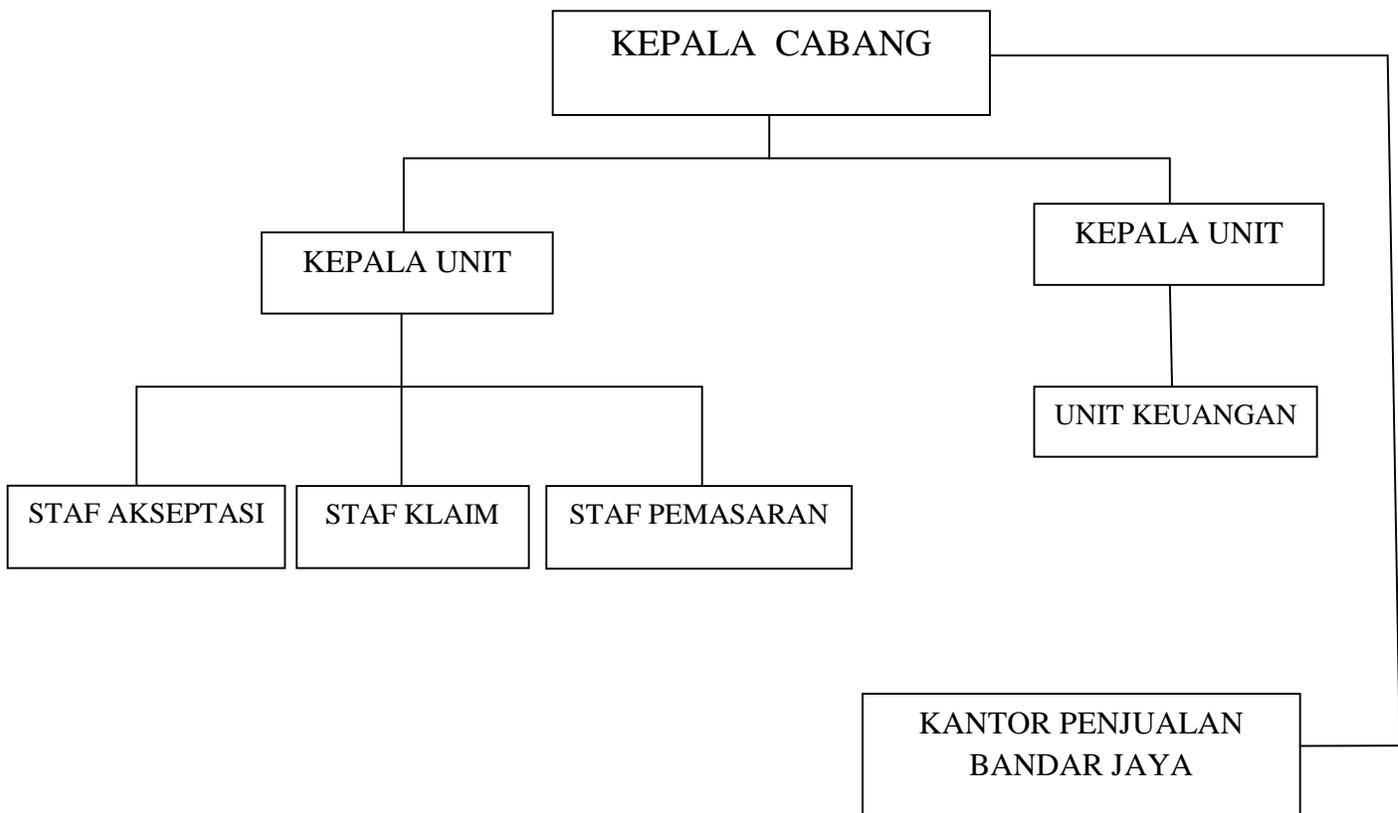
b. Misi

Menyelenggarakan Usaha Asuransi Dengan Pelayanan Prima dan Tetap Menjaga Kemampuan Yang Berkesinambungan.

3. Struktur Organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) Cabang Bandar Lampung.

Berikut gambar struktur organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) Cabang Bandar Lampung.

Gambar 4.2. STRUKTUR SUSUNAN PT. Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) Cabang Bandar Lampung



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil dan Pembahasan terkait dengan Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi Provinsi Lampung membuahakan kesimpulan yang menjawab pertanyaan Bagaimana Implementasi kebijakan AUTP (Asuransi Usaha TaniPadi) Provinsi Lampung yaitu :

1. Faktor komunikasi dalam implementasi program asuransi usaha tani padi provinsi lampung belum tersalurkan dengan baik. Masih adanya ketua kelompok tani yang belum mendapatkan sosialisasi, sehingga hal ini menyebabkan ketidaktahuan dengan prosedur premi asuransi yang diberikan oleh Pemerintah
2. Faktor sumber daya, sumbedaya belum memenuhi kapasitas untuk menunjang keberlangsungan program Asuransi Usaha Tani Padi karena kuantitas agen marketing PT. Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) kurang memadai.
3. Faktor disposisi/sikap pelaksana, bila dilihat dari kesimpulan indikator disposisi, dapat disimpulkan aspek disposisi/sikap agen pelaksana belum terpenuhi pada implementasi program Asuransi Usaha Tani Padi dikarenakan masih ditemukannya agen pelaksana yang pasif dan para agen pelaksana secara umum tidak mendapatkan insentif dalam implementasi program Asuransi Usaha Tani padi Sehingga hal tersebut berpengaruh kepada kemampuan para agen pelaksananya dalam menyikapi maupun melaksanakan kebijakan

4. Faktor struktur birokrasi, Bila dilihat dari kedua kesimpulan indikator struktur birokrasi dapat disimpulkan aspek struktur birokrasi belum terpenuhi karena agen pelaksana ada yang tidak mendapatkan SOPs dan ada yang mendapatkannya tetapi sulit untuk merealisasikan. Sehingga kinerja struktur birokrasi belum dapat terdongkrak kearah yang sudah digariskan sebelumnya.

B. Saran

Sesuai dengan paparan dari kompilasi pembahasan, maka peneliti memberikan masukan sebagai berikut :

1. Bila dilihat dari penyaluran komunikasi belum tersalurkan dengan baik, peneliti menyarankan agar agen pelaksana malakukan sosialisasi langsung kepelaku sasaran atau petani, jangan hanya melalui Penyuluh Petani Lapangan (PPL) saja agar petani dapat mengerti dengan jelas dengan adanya program asuransi ini dikarenakan mayoritas petani tidak mengetahui dengan adanya program ini.
2. Bila dilihat dari kesimpulan keempat indicator sumberdaya diatas, dapat disimpulkan sumberdaya belum memenuhi kapasitas untuk menunjang keberlangsungan program Asuransi Usaha Tani Padi. Peneliti menyarankan agar ditingkatkannya kapasitas sumberdaya manusia sepertikuantitas, kualitas dan pelatihan pada agen marketing PT. Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO Cabang Lampung).
3. Bila dilihat dari kesimpulan indicator disposisi, dapat disimpulkan aspek disposisi/sikap agen pelaksana belum terpenuhi pada implementasi program Asuransi Usaha Tani Padi. Sehingga hal tersebut berpengaruh kepada kemampuan para agen pelaksana nya dalam menyikapi maupun melaksanakan kebijakan, peneliti menyarankan perlu ditingkatkan nya

lagi motivasi kepada agen pelaksana seperti reward agar para agen pelaksana mempunyai sikap ingin berprestasi dalam melaksanakan tupoksinya masing-masing.

4. Bila dilihat dari kedua kesimpulan indikator struktur birokrasi dapat disimpulkan aspek struktur birokrasi belum terpenuhi, sehingga kinerja struktur birokrasi belum dapat terdongkrak kearah yang sudah digariskan sebelumnya, peneliti menyarankan agar penyaluran SOPs secara merata kepada paraagen pelaksana dan mempermudah prosedur asuransi agar dapat dimengerti oleh para petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistio, Eko Budi. (tanpa tahun). *Kebijakan Publik (Publik Policy)*. Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Usman, Prof Dr. Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, M.Pd. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan*. Jakarta PT Bumi Aksara.

Dokumen-dokumen

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 2015. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Lampung

Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi